

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Adanya Kebijakan yang Dilaksanakan**

##### **a. Isi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam Mengatasi Pertambangan Illegal**

Melihat persebaran pertambangan ilegal khususnya untuk pertambangan timah membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. kebijakan yang dikeluarkan adalah dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

##### **b. Adanya Program yang Dilaksanakan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung**

###### **1. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan**

Program terkait pencegahan pertambangan ilegal yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan agar dapat bekerja secara aman dan nyaman

2. melakukan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.

Program ini melahirkan kegiatan yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung dimana staff Dinas akan melakukan pengawasan tiga kali dalam satu bulan ke daerah yang terindikasi melakukan kegiatan secara illegal. Selain itu, polisi pamong praja selaku stakeholder yang bekerja sama melakukan kegiatan penertiban kepada pihak yang melanggar aturan.

Kedua program tersebut dilakukan agar aktivitas pertambangan illegal tidak terjadi lagi di Kabupaten Belitung.

## **B. Sasaran dan Manfaat Kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam mengatasi Pertambangan Illegal**

- a. Sasaran dari kebijakan tersebut mengarah kepada masyarakat pekerja tambang serta untuk masyarakat yang merasa terganggu akibat aktivitas pertambangan illegal. Kebijakan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat pekerja tambang dengan tujuan agar pekerja tambang mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pada saat melakukan kegiatan pertambangan. Akan tetapi, sosialisasi belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pertambangan

dan Energi sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan tersebut.

- b. Manfaat dari dikeluarkan kebijakan ini adalah agar kegiatan pertambangan di Kabupaten Belitung dapat memperhatikan dampak lingkungan, serta kebijakan ini menjadi jalan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan pertambangan secara aman dan nyaman dan hasil yang didapatkan dari kegiatan pertambangan dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah.

### **C. Unsur Pelaksana kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam Mengatasi Pertambangan Illegal**

- a. Untuk tingkat pemahaman dinas Pertambangan dan Energi dalam menjalankan kebijakan sudah cukup baik, dimana ketika pemerintah provinsi mengadakan sosialisasi terkait dalam mengatasi pertambangan illegal, Dinas Pertambangan dan Energi langsung membuat program kerja yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Penyusunan program kerja tersebut melibatkan seluruh staff di Dinas Pertambangan dan Energi sehingga mereka mengetahui tugasnya masing – masing. Selain itu, dalam penyusunan program kerja, Dinas Pertambangan dan Energi juga bekerja sama dengan stakeholder lain yaitu Satuan Polisi Pamong Praja hingga pihak kecamatan.

b. Sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Pertambangan dan Energi dalam hal ini belum memadai untuk menjalankan program tersebut. Kekurangan sumber daya manusia menjadi kendala yang dihadapi Dinas Pertambangan dan Energi. Dengan staff yang tidak mencukupi untuk melakukan pembinaan serta pengawasan tersebut, maka Dinas Pertambangan dan Energi bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja hingga pihak kecamatan untuk memaksimalkan tugas yang dijalankan. Selain sumber daya manusia, fasilitas pendukung yang dimiliki dinas belum mencukupi untuk melaksanakan program kerja yang dibuat. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran dana yang disediakan untuk melaksanakan program tersebut.

c. Standar Baku yang digunakan Dinas Pertambangan dan Energi dalam Melaksanakan Kebijakan

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, Dinas Pertambangan dan Energi menggunakan standar operasional prosedur atau SOP sehingga staff terkait dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan isi SOP yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, staff di Dinas Pertambangan dan Energi telah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

#### **D. Rekomendasi Penelitian**

Dari kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka rekomendasi yang peneliti berikan untuk penelitian ini adalah:

1. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi pertambangan ilegal yang menghasilkan program kerja yang dibentuk oleh Dinas Pertambangan dan Energi harus lebih maksimal dalam pelaksanaannya.
2. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat harus menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat sehingga masyarakat memahami apa yang menjadi aturan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan.
3. Tindakan penertiban oleh Dinas Pertambangan yang dibantu satuan Polisi pamong Praja harus lebih tegas lagi. Kegiatan razia yang dilaksanakan juga harus sering dilaksanakan untuk membuat efek jera kepada pelaku tambang yang mengabaikan peringatan yang diberikan pemerintah.
4. Mengenai sumber daya yang kurang memadai dalam pelaksanaan kebijakan ini, disarankan kepada staff yang terdapat di Dinas Pertambangan dan Energi serta stakeholder lainnya yang terlibat tetap harus mengoptimalkan kinerjanya agar kegiatan pertambangan ilegal yang terdapat Kabupaten Belitung tidak beroperasi lagi.